

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

A. Hildayanti^{1*}, Anwar Parawangi², Rasdiana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the implementation of a website-based public information system in Taeng Village, Pallangga District, Gowa Regency. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive type of research. The results of the study consist of six aspects, namely: 1) Communication from the transmission, clarity and consistency of communication distribution between the government and the community is still less effective. 2) Bureaucratic structure consisting of SOPs and fragmentation has been carried out in accordance with applicable regulations. 3) Resources consist of human resources, said to be ineffective because they still need staff to operate the website, the facilities and infrastructure used are adequate. 4) The disposition has been effective with the support of the village head and the community. The supporting factors are that the bureaucratic structure has been running according to the rules, the facilities and infrastructure used are adequate, and the disposition to get support from the village head and the community, the inhibiting factor is that communication has been running even though it has not been optimal, and human resources that still need additional staff.

Keywords: implementation, information system, website

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng kecamatan pallangga kabupaten gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian terdiri dari enam aspek yaitu: 1) Komunikasi dari transmisi, kejelasan dan konsistensi penyaluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang efektif. 2) Struktur Birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) Sumberdaya terdiri dari SDM, dikatakan belum efektif karena masih membutuhkan staff untuk mengoperasikan website, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai. 4) Disposisi sudah efektif dengan adanya dukungan dari kepala desa beserta masyarakat. Adapun faktor pendukung yaitu struktur birokrasi sudah berjalan sesuai aturan, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai, dan disposisi mendapatkan dukungan dari kepala desa dan masyarakat, faktor penghambat yaitu komunikasi sudah berjalan meskipun belum optimal, serta SDM yang masih membutuhkan penambahan staff.

Kata kunci: implementasi, sistem informasi, website

* ahildayanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga termasuk tindakan atau aplikasi dari sebuah planning yang sudah disusun secara matang, cermat serta jelas. Jadi, implementasi dilakukan bila telah ada perencanaan yang baik serta matang, atau sebuah planning yang sudah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga telah terdapat kepastian serta kejelasan akan planning tersebut. Implementasi juga berarti penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan masalah atau dampak terhadap sesuatu. Yaitu suatu aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan yang berfokus serta mengacu di adat-istiadat tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan aktivitas strategi dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu menggunakan laporan- laporan yang diharapkan.

Sistem informasi Desa merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan oleh implementasi Undang-Undang Desa. pada Bagian Ketiga UU

Desa Pasal 86 perihal Sistem informasi Pembangunan Desa serta Pembangunan daerah Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak menerima akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

World Wide Web atau WEB ialah salah satu layanan yang didapat oleh pengguna komputer yang terhubung ke internet. Website merupakan sebutan bagi sekelompok laman web (webpage) yang biasanya diartikan sebagai bagian yang berasal dari suatu nama domain atau subdomain pada WWW di internet. Website pula bersifat tidak aktif juga bergerak maju yang membuat 1 rangkaian bangunan dan saling terkait, dimana masing-masing dihubungkan menggunakan jaringan (hyperlink).

Menurut David Easton dalam (Anggara, 2014) “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). James E. Anderson (Anggara, 2014) menyatakan bahwa, “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Anderson dalam (Widodo, 2021) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu a) *agenda setting*, b) *policy formulation*, c) *policy*

adoption, d) policy implementation, dan e) policy assessment evaluation.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi ialah sebagai berikut: “aplikasi keputusan kebijakan dasar, umumnya pada bentuk undang-undangan, tetapi bisa berbentuk perintah pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang krusial atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi problem yang ingin diatasi, menjelaskan secara tegas tujuan atau target yang ingin dicapai, serta aneka macam cara buat menstrukturkan atau mengatur proses implementasi” Solichin Wahab (Suparno, 2017).

Menurut Edward dalam (Parawangi, 2011) menjelaskan tentang model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) yaitu “Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi” (*Direct and Indirect Impact on Implementation*). Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "Implementasi kebijakan sistem informasi publik merupakan langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang sudah ditetapkan sistem informasi publik serta akibat dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi"(*Policy Implementation*

of public information system is the stage of policy making between the establishment of a policy public information system and the consequence of the policy for the people whom it affects). Menurutnya, problem utama administrasi publik merupakan kurangnya perhatian bahwa penghancuran pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses (lack of attention the decision of policy makers will not be carried out successfully). Edward menyarankan untuk memperhatikan empat informasi utama agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu; (1) Disposisi, (2) struktur birokrasi, (3) sumber daya, serta (4) komunikasi.

Variabel pertama mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, merupakan komunikasi. Komunikasi menurutnya, sangat memilah keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai jika para penghasil keputusan (*decision maker*) telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan ketika komunikasi sudah berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implemementasi wajib ditransmisikan pada implementer yang tepat. Selain itu, kebijakan yang

dikomunikasikan pun harus akurat, konsisten, serta tepat.

Untuk mengetahui sejauhmana komunikasi itu bisa berfungsi secara akurat, konsisten, serta tepat, terdapat 3 indikator yang bisa digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: (1) Transmisi: dalam penyaluran komunikasi tak jarang terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman disebabkan komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi. Akibatnya, terjadi distorsi bentuk implementasi suatu kebijakan yang gagal. (2) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas serta tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, namun pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan. (3) Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu komunikasi yang harus konsisten, serta jelas (agar diterapkan dan dijalankan). Sebab jika perintah yang diberikan terus berubah-ubah, hingga bisa menimbulkan

kebingungan bagi pelaksana yang ada di lapangan.

Variabel kedua ialah Sumberdaya. Sumberdaya merupakan suatu hal terpenting untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik. terdapat beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya bisa berjalan dengan baik, yaitu: (1) Staf, atau lebih tepat dikenaal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan seringkali terjadi pada implementasi kebijakan, salah satunya ditimbulkan oleh pegawai/staff yang kurang memadai, tidak kompeten pada bidangnya, serta mencukupi. (2) informasi, pada implementasi kebijakan informasi memiliki 2 bentuk, yaitu a) informasi yang bekerjasama dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus tahu apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. b) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap aturan serta regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan. Implementor perlu tahu apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. (3) Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah bisa terlaksana. Kewenangan ialah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. (4) Fasilitas, Implementor mungkin mempunyai staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana serta prasarana), maka implemmentasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ke 3 yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implemmentasi kebijakan, bagi George C. Edward III, ialah disposisi. Bila pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, hingga segala pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, namun juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pada praktiknya tidak terjadi bias.

Variabel keempat, hal yang tidak kalah pentingnya menurut Edward III turut mempengaruhi level keberhasilan implementasi kebijakan artinya struktur birokrasi. Kebijakan yang sangat kompleks menuntut adanya kerjasama orang banyak . Saat struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini dapat mengakibatkan sumberdaya menjadi tidak efektif serta akan merusak jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus bisa mendukung kebijakan yang sudah

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Misalnya di Indonesia, sedikitnya koordinasi serta kerjasama antara skateholder membentuk implementasi kebijakan yang sesekali mengalami gangguan.

Meski demikian model implementasi kebijakan Edward III yang dijelaskan sebelumnya, memiliki kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak sulit. Kelemahannya ialah tidak mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor di luar birokrasi pemerintahan, atau organisasi pelaksana.

Menurut (Jogiyanto, 2009) “Sistem informasi dapat didefinisikan menjadi suatu sistem didalam suatu organisasi adalah kombinasi berasal dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-mekanisme, dan pengendalian yang ditujukan untuk menerima jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi frekuwensi kepada manajemen serta yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal serta eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan informasi yang cerdas”. Menurut Mulyanto (2009) sistem informasi adalah suatu

komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ralph, et al. dalam (Rahayu & Anggadini, 2014) menyatakan bahwa sistem informasi yang berkualitas biasanya memenuhi kriteria mirip fleksibel, efisien, praktis diakses serta sempurna saat.

Sistem informasi menurut Rustiyanto dalam Kaka, (2021) memiliki tujuan sebagai: (1) Menyediakan informasi yang dipergunakan didalam perhitungan harga pokok jasa, produk dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. (2) Menyediakan informasi yang digunakan pada perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, serta pemugaran berkelanjutan. (3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan sistem informasi.

Yuhfizar dalam (Krisnayani et al. 2016), web merupakan suatu metode untuk menampilkan informasi pada internet, baik berupa teks, gambar, bunyi dan juga video yang interaktif serta memiliki kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen menggunakan dokumen lainnya

(hypertext) yang bisa diakses melalui sebuah *browser*.

Manfaat web dapat memberikan keuntungan besar karena ia dapat diakses secara global melalui jaringan internet, informasi tentang produk tersedia secara online dan dapat menjawab pertanyaan dari konsumen dengan cepat dan murah, pada umumnya situs web menyediakan beberapa artikel beserta tips dan informasi Ketika suatu situs web sering update dan memposting artikel, masyarakat umum dapat menggunakannya sebagai sumber informasi. Dengan ini masyarakat dapat melihat produk dan jasa yang ditawarkan dalam situs web tersebut, informasi tentang bisnis dan perusahaan dapat diposting dalam situs web, dengan ini kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena konsumen lebih percaya jika mereka mengetahui sesuatu tentang perusahaan tersebut (MZ, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif tipe deskriptif karena metode kualitatif deskriptif bergantung pada keterangan dari informan sebagai subjek dari penelitian. Dalam metode kualitatif mempunyai karakteristik bersifat deskripsi. Pemilihan informan

pada lakukan, menjadi kunci pemegang asal yang paling seksama.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan dari pengetahuan tertentu yang akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi suatu masalah.

Penelitian ini berawal dari masalah yang ada pada lapangan, yang menggunakan tujuan untuk memperoleh sebuah data yang sebenarnya. Sehingga penulis mendatangi tempat yang menjadi lokasi penelitian, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menemui informan untuk memperoleh data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan terkait judul Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menggunakan teori Edward, (1980) Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi:

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting guna menunjang keberhasilan implementasi suatu program, karena dengan adanya komunikasi maka para pelaksana kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa tujuan kebijakan, arah kebijakan, kelompok sasaran suatu kebijakan serta juga dapat memahami apa yang harus dilakukan selaku pelaksana kebijakan. Dalam hal implementasi Sistem Informasi publik Berbasis Website telah melakukan berbagai upaya komunikasi kepada para para pelaksana kebijakan diperkuat dengan penelitian Effendy, dalam Dowongi et al., (2014) komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung melalui media.

Transmisi/Penyyaluran komunikasi. Aspek komunikasi pada aparatur Desa dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, sistem informasi desa berbasis website, karena penting untuk disosialisasikan dan diterapkan. Kebijakan sistem informasi desa berbasis website ini harus di terapkan dan di pahami secara

baik oleh aparatur desa yang bekerja dalam hal ini khususnya di desa taeng dan disosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (target group).

Transmisi merupakan penyaluran atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementor diperkuat dengan penelitian (Mursalim, 2017) Walikota Bandung menugaskan seluruh komponen SKPD atau Dinas-dinas harus menjalankan Smart City dan mensosialisasikan mengenai program Smart City kepada daerah nya masing-masing yang terdapat di Kota Bandung agar sosialisasi atau penyuluhan mengenai Smart City lebih merata kepada seluruh kalangan masyarakat.

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Kejelasan dalam system informasi public berbasis website, kebijakan yang telah di sampaikan oleh kepala desa terhadap pemerintah desa, kapala dusun serta rt/rw yang akan ditransmisikan kepada pengguna website yang harusnya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

Kejelasan merupakan bagaimana komunikator untuk menyampaikan pesannya secara jelas sehingga tercapailah tujuan komunikasi dengan sampainya pesan kepada komunikan diperkuat dengan penelitian (Ratri, 2014) Ketidakjelasan informasi akan menghambat implementasi kebijakan. Sampai saat ini proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan namun belum sampai pada masyarakat sebab hanya beberapa saja yang mengetahui esensi dari KLA bahkan sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya kebijakan Kota Layak Anak. Menurut penuturan Ratih selaku warga Kota Probolinggo, selama ini belum ada sosialisasi khusus untuk Kota Layak Anak pada masyarakat. Demikian pula yang dinyatakan Sukardimito, sosialisasi kepada masyarakat belum dilaksanakan secara massif. Sosialisasi baru dilakukan di sekolah-sekolah, kepada LSM atau Ormas pun belum sepenuhnya dilaksanakan.

Konsisten juga diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasi system informasi public berbasis website didesa taeng konsisten dalam melaksanakan kegiatan

kegiatan informasi desa harus diperhatikan oleh pemerintah desa agar masyarakat dapat mendapatkan informasi mengenai kegiatan dari pemerintah desa.

Konsistensi juga merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan sebuah komunikasi untuk konsisten dan jelas agar ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan diperkuat dengan penelitian Ratri, (2014) kekonsistenan sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Ketidak konsistenan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Dinas-dinas pelaksana teknis menyatakan bahwa sampai saat ini perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sudah konsisten.

Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari Struktur birokrasi, yakni SOP dan fragmentasi. Karakteristik Struktur Birokrasi dalam implementasi system informasi public

berbasis website akan dijelaskan sebagai berikut: (a) *Standart Operational Procedure* (SOP) menjadi faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi dikarenakan dengan adanya SOP maka kebijakan dapat dilaksanakan dengan jelas dan seragam karena sudah terdapat prosedur yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan.

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di perkuat dengan penelitian Anta Kusuma & Simanungkalit, (2022) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. (b) Fragmentasi yaitu Para aparatur kebijakan dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Penyebaran

tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, misalnya, Bagian Informasi berkewajiban untuk menyetorkan data yang terkumpul untuk meningkatkan akselerasi pelayanan ke bagian pengolahan data dan sebaliknya.

Penyebaran tanggung jawab para aparatur desa taeng saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar pelayanan system informasi berbasis website dapat berhasil dilaksanakan. Diperkuat dengan F, (2022) Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab agar tetap bersaing secara sehat, aparatur SAMSAT Wilayah Kota Makassar berpegang pada tindakan SAMSAT Wilayah Kota Makassar, yaitu mewujudkan pegawai Samsat Wilayah Kota Makassar yang profesional dan fasilitatif serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan suasana menjadi Kantor yang bertarif (transparan, akuntabel, responsif, independent dan fairnes), hukum dalam pelayanan.

Sumber Daya

Implementasi sistem informasi public berbasis website diperlukan adanya sumber daya yang baik. Faktor ini sangat menentukan untuk mendukungnya keberhasilan kebijakan. Menurut Edward III (1980:53), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/pegawai atau sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang mempuni maka memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya merupakan penyebab tidak terlaksana dengan baik implementasi kebijakan. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sumber daya manusia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah adanya staff yang bertugas dan bertanggung jawab untuk

pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan pelayanan melalui website ini yang bertugas adalah sekretaris desa dikarenakan belum ada staff khusus yang disediakan, Kepala Desa merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di Desa Taeng, sedangkan operator merupakan staff yang bertugas untuk melayani masyarakat yang melakukan pengurusan melalui website desa, selanjutnya ada Ketua RT dan ketua RW yang merupakan petugas validasi yang memiliki tugas seperti memberikan tanda tangan pada pengurusan surat menyurat manual.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diperkuat dengan penelitian Hal ini sesuai dengan kriteria sumber daya manusia pada teori Edward III dalam Yuanita et al., (2022) yang mengatakan bahwa walau isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Sarana dan Prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk

mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Diperkuat dengan penelitian Ratri, (2014) Sumber daya fasilitas atau sarana dan pra-sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan bisa berupa gedung, tanah, alat dan sarana yang semuanya berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Disposisi

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga diri sikap pelaksana tersebut. Di perkuat dengan penelitian Dowongi et al., (2014) Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat

demokratik. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan yang baik dengan sasaran dan keinginan pembuat kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi yaitu karakteristik yang menempel kepada implementor, (pegawai/petugas) seperti: komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, kejujuran, semangat pengabdian.

Faktor Pendukung

Factor pendukung implementasi system informasi public berbasis website salah satunya adalah aturan pada UU Desa No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus, mengenai sistem informasi seperti SID. Undang-Undang Desa sejatinya adalah kebijakan pemerintah yang patut untuk diapresiasi karena dikeluarkannya UU ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk membangun desa. Peraturan bupati Gowa No. 21 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah. Selanjutnya sarana dan prasarana cukup mendukung untuk mengimplementasikan system informasi berbasis website ini di desa taeng. Dan

juga tentunya dukungan dari masyarakat.

Faktor Penghambat

Pemerintah desa dalam menyiapkan infrastruktur sudah tergolong memadai. Sedangkan dari Faktor penghambatnya dari SDM masih memerlukan satu staff yang bisa membantu mengoperasikan website karena kekurangan staff ini juga mempengaruhi keberhasilan dari konsistensi dan juga menghambat berjalannya pelayanan serta penyebaran infoermasi. Diperkuat dengan penelitian Setyawan & Srihardjono, (2016) Faktor penghambat implementasi Program Dana Desa di Desa Landungsari sesuai dengan Undang- Undang Desa adalah kendala yang muncul di lingkungan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti dengan judul Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng ditinjau dari unsur: komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi yang meliputi: a. Komunikasi dalam implementasi sistem informasi publik

berbasis website di desa taeng sudah berjalan meskipun masih perlu ditingkatkan dari transmisi; penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, kejelasan; masih kurang karena masih ada beberapa layanan yang belum maksimal untuk diakses oleh masyarakat, Konsistensi; masih belum efektif dalam pembaruan data pada laman website, b) Struktur Birokrasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng berdasarkan, SOP; peraturan bupati gowa yang sudah ada pada tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah, Fragmentasi; sudah berjalan sesuai dengan penyebaran tanggung jawabnya masing-masing, c) Sumberdaya implementasi sistem informasi publik didesa taeng terdiri dari SDM; dioperasikan oleh sekertaris desa yang sudah mendapatkan pelatihan khusus terkait pengopersian website, Sarana dan prasarana; sudah memadai baik dari segi sarana ataupun prasarana yang digunakan, d) Disposisi terhadap implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa taeng sudah efektif karena kepala desa sangat mendukung adanya website ini, 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi sistem

informasi publik yaitu: a) Faktor pendukung implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng terdiri dari: SOP; peraturan bupati gowa yang sudah ada pada tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah, Fragmentasi; sudah berjalan sesuai dengan penyebaran tanggung jawabnya masing-masing. Sarana dan prasarana; sudah tergolong memadai meskipun belum maksimal tetapi sudah berjalan dengan baik, b) Faktor penghambat implementasi sistem informasi publik berbasis website didesa taeng terdiri dari: transmisi; penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, kejelasan; masih kurang karena masih ada beberapa layanan yang belum maksimal untuk diakses oleh masyarakat, Konsistensi; masih belum efektif dalam pembaruan data pada laman website. Dan SDM; masih membutuhkan staff dalam membantu mengoperasikan website agar dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyanto. (2009). *Konsep dan Aplikasi Sistem Informasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, J. E. (1978). *Public Policy making* (R. and Winston (ed.)). Boston: Cengage Learning.

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Setia.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Dowongi, A., Lengkong, F. D., & Kiyai, B. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik* 3(004), p. 59.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (C. Q. Press (ed.)). Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- F, D. U. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Drive THRU di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4)
- Jogiyanto. (2009). *Teknologi Sistem Informasi* (edisi 3). Yogyakarta: Andi Offset.
- Kaka, J. B. I. (2021). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Desa Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY*. pp. 1–39.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), pp. 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- MZ, Y. (2016). Evaluasi Penggunaan Website Universitas Janabadra Dengan Menggunakan Metode Usability Testing. *Informasi Interaktif*, 1(1), pp. 34–43. [journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/viewFile/345/253%0Ahttp://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/view/345](https://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/viewFile/345/253%0Ahttp://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/view/345)
- Parawangi, A. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone* (Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Rahayu, S. K., & Anggadini, S. D. (2014). Analisis Budaya Organisasi Pada Pengembangan Sistem Informasi di unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), pp. 203–210. <https://doi.org/10.34010/miu.v12i2.27>
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Implementation Science*, 39(1), pp. 1–15.
- Setyawan, D., & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), pp. 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.